

RINGKASAN HASIL PENELITIAN
DI BIDANG HUKUMKEDUDUKAN PERUM PEGADAIAN
DALAM ERA PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR

(Moch. Isnaeni, Y. S. Simamora, A. Y. Hernoko, Ny. H. Sundari
K., 1992 : 50 halaman)

Sebagai upaya meningkatkan pembangunan nasional Indonesia, pertumbuhan ekonomi dipacu terus dengan giat di samping usaha untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan. Salah satu kegiatan untuk menunjang program tersebut yakni dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif agar para pelaku ekonomi akan lebih leluasa mengembangkan kreativitasnya. Pelbagai bidang usaha sengaja dipacu agar mampu berdiri tegak sebagai pilar penyangga ekonomi nasional.

Jawa Timur sebagai kawasan yang potensial untuk berkembang lebih optimal, tak ketinggalan berusaha keras memajukan pelbagai sektor usaha sebagai corak ekonomi pasar yang sengaja digalang. Tak urung sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai pendukungnya sudah barang tentu akan mengikuti arus pembenahan global yang tak mungkin dielakkan. Untuk menutup kebutuhan sektor modal yang banyak diminati oleh para pengusaha demi meningkatkan dan mendiversifikasi kegiatannya, memaksa berbagai lembaga pembiayaan berbenah diri juga secara profesional untuk memenuhi lajunya permintaan. Sarana perkreditan yang dikelola harus disiapkan lebih matang demi tantangan pasar yang mulai menguk tajam.

Instansi Pegadaian sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang keberadaannya telah lama dikenal masyarakat, terpengaruh pula dengan arus ekonomi pasar yang semakin menggebu. Dengan jurus mengubah status Pegadaian dari Perjan (Perusahaan Jawatan) menjadi Perum (perusahaan Umum) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, tidak lain hanya sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi gejolak yang pasti timbul dalam era pertumbuhan ekonomi. Gejolak yang muncul itu antara lain akan meningkatnya jumlah permintaan pinjaman dana dari masyarakat, khususnya para pengusaha dalam seluruh strata.

Pegadaian sebagai salah satu instansi memang telah lama lekat di hati masyarakat, khususnya dari kalangan jelata. Tuntutan kebutuhan dana mendadak yang tak segera bisa dipenuhi oleh seseorang, yang bersangkutan akan segera ingat pada jasa pinjaman yang disediakan oleh Pegadaian dengan cara-cara relatif mudah. Mekanisme kerja Pegadaian yang dapat dengan cepat dijadikan ajang pelarian oleh rakyat kecil dalam upaya menutup kebutuhan-kebutuhan kese-

hariannya, sering dianggap sebagai dewa penyelamat yang eksistensinya perlu dilestarikan. Kendati pada sisi lain mereka kadang dihinggapi rasa malu kalau sedang bertandang ke rumah gadai.

Dengan posisi seperti itu, Pegadaian sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang telah lama ada, dalam era pertumbuhan ekonomi sebagaimana sekarang tentunya juga dituntut untuk lebih profesional dalam melayani nasabah yang datang bertandang. Ini pantas diwaspadai mengingat masyarakat sekarang sudah lebih kritis dan rasional, ditambah lagi alam persaingan di bidang usaha pinjaman ini makin ketat saja, semisal seperti yang dicanangkan oleh pihak perbankan. Menghadapi gejala seperti ini sudah barang tentu dengan status sebagai Perum, pihak Pegadaian dituntut pula untuk bersikap lebih profesional dalam melayani permintaan dana pinjaman dari masyarakat. Dalam era ekonomi pasar, profesionalisme sudah merupakan ciri cetakan yang harus melekat pada semua bidang usaha, tak terkecuali bidang jasa pemberian pinjaman. Dari titik ini keberadaan Pegadaian sebagai salah satu pelaku ekonomi, tingkat profesionalismenya mulai menggelitik banyak pihak untuk mempertanyakannya. Sebab perubahan menjadi Perum lebih memungkinkan kiprah Pegadaian menjadi leluasa, tak terkecuali dalam meningkatkan profesionalitasnya.

Dalam kegiatan penelitian yang diselenggarakan terbukti bahwa tingkat profesionalisme di lingkungan Pegadaian masih belum dibenahi secara optimal. Berbagai kendala yang menghadang belum juga kunjung teratasi, semisal masih banyaknya calo yang berkeliaran di pelataran Pegadaian yang disinyalir sengaja ditunjang oleh orang dalam sendiri. Tertib administrasi yang belum tertata mantap ikut memperkeruh mekanisme operasionalisasi kerja yang tergelar. Cara pelayanan yang masih konvensional, kentara belum hapus dari ruang-ruang kerja Pegadaian.

Kalau sudah semenjak lama Pegadaian terkenal diakrabi kalangan rakyat jelata di mana mereka datang meminjam tak lain sebagian besar untuk urusan konsumtif, maka dalam era pertumbuhan ekonomi seperti dewasa sekarang, apakah citra Pegadaian dapat mensepadani arus yang kini mengalir, yakni ikut menunjang merebaknya lapangan usaha. Berarti apakah Pegadaian berhasil menyalurkan dana pinjamannya lebih banyak ke sektor yang bersifat produktif ketimbang yang konsumtif seperti yang selama ini dikenal. Berbagai kelebihan juga kemudahan yang digelar oleh Perum Pegadaian untuk menarik nasabah, memang diharapkan akan melahirkan variasi pinjaman ke tingkat yang lebih bersifat produktif. Namun rupanya harapan ini belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Terbukti sebagian besar nasabah yang datang masih saja bertandang pinjam untuk menutup kebutuhan konsumtifnya. Sedang variasi kedatangan nasabah untuk menutup keperluan-keperluan

yang bersifat produktif belum memperlihatkan hasil yang memadai. Konfigurasi seperti ini sudah barang tentu menandakan kalau Pegadaian belum mampu mengubah diri menjadi pelaku ekonomi pasar seperti yang diharapkan. Keberhasilan menggaet nasabah untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, tanpa meninggalkan rakyat kecil terjerat ijon dan lintah darat, memang tugas yang tidak ringan bagi Pegadaian. Namun itulah yang semestinya diwujudkan dalam era pertumbuhan ekonomi dewasa ini sebagai salah satu upaya mendukung program pemerintah dalam usaha memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

(L.P. Fakultas Hukum, Universitas Airlangga;
460/P4M/DPPM/L-3311/BBI/1992, 17 Juni 1992)

